

**PENDAMPINGAN TIGA PILAR DESA DALAM MENINGKATKAN  
KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI MEDIA MASSA**

**Doan Widhiandono**

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[doanwidhi@untag-sby.ac.id](mailto:doanwidhi@untag-sby.ac.id);

**D Jupriono**

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[juprion@untag-sby.ac.id](mailto:juprion@untag-sby.ac.id);

**Achluddin Ibnu Rochim**

Prodi Administrasi Publik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung tiga pilar desa—kepala desa/lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas—dalam mengomunikasikan peran dan kiprah pembangunan desa kepada masyarakat luas melalui media massa. Pengabdian dilakukan oleh tim dosen bidang komunikasi publik dan manajemen media kepada desa-desa peserta Anugerah Patriot Jawi Wetan (APJW) 2024. Pendekatan meliputi pelatihan strategi komunikasi, pengelolaan media sosial, dan hubungan dengan media lokal. Hasil menunjukkan bahwa komunikasi publik yang efektif berperan signifikan dalam meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa, menciptakan transparansi, dan memperkuat partisipasi warga.

**Kata kunci:** *Komunikasi publik; media massa; partisipasi masyarakat; pembangunan desa; tiga pilar desa.*

**ABSTRACT**

This community service aims to support the three village pillars—the head of village, Babinsa (village advisory military officer), and Bhabinkamtibmas (community police officer)—in communicating the roles and contributions of village development to the broader community through mass media. The service was carried out by a team of lecturers specializing in public communication and media management for villages participating in the Anugerah Patriot Jawi Wetan (Award of Patriots of East Java/APJW) 2024 program. The approach included training in communication strategies, social media management, and relationships with local media. The results show that effective public communication plays a significant role in enhancing community appreciation for village development programs, fostering transparency, and strengthening citizen participation.

**Keywords:** *Citizen participation; mass media; rural development; public communication; three village pillars.*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal sebagian besar populasi, tetapi juga menjadi lokus utama pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, desa diberikan wewenang lebih besar untuk mengelola sumber daya lokal, menyusun kebijakan, dan menciptakan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan pengelolanya untuk mengomunikasikan program-program tersebut kepada masyarakat lokal maupun khalayak yang lebih luas.

Pentingnya posisi desa dalam pembangunan di Indonesia tersebut juga dinyatakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian tersebut memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui gotong royong (<https://kemendesa.go.id/berita/view/kemendesa/2956/visi-dan-misi>).

Dalam kerangka itu, desa menjadi salah satu elemen penting, mengingat perannya sebagai fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan misi yang mencakup penguatan keamanan nasional, kemandirian ekonomi, serta pengelolaan sumber daya maritim, kementerian menempatkan desa sebagai titik strategis dalam menciptakan masyarakat yang maju, demokratis, dan sejahtera. Keberhasilan visi ini bergantung pada bagaimana desa mampu mengelola potensi lokal untuk mendukung pembangunan nasional.

Dengan kata lain, pembangunan desa tidak terlepas dari strategi pembangunan nasional yang tujuannya adalah memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat struktur sosial. Desa sebagai unit administratif terkecil memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberdayakan dengan efektif (Heri, A., & Supardal, 2024). Keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan desa, mulai perencanaan hingga evaluasi adalah kunci mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

Desa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi cermin identitas bangsa. Dalam upaya mewujudkan masyarakat berkepribadian, peran desa sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal menjadi sangat penting. Misi kementerian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa juga bergantung pada pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa yang mandiri mampu menciptakan inovasi di bidang ekonomi, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh. Dengan demikian, desa berfungsi sebagai katalisator perubahan positif yang berakar dari potensi lokal menuju kemajuan nasional.

Pentingnya posisi desa dalam pembangunan Indonesia tidak dapat diabaikan. Desa yang maju dan mandiri mampu menjadi penopang kemandirian ekonomi nasional, sekaligus menjamin pemerataan pembangunan. Melalui pendekatan yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan

infrastruktur, desa dapat menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, visi Kementerian Desa untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian bukan hanya sebuah harapan, tetapi tujuan yang dapat tercapai. Desa, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, harus terus didukung dan diberdayakan agar mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Pentingnya fungsi desa juga terlihat dalam struktur organisasi TNI-AD. Insitusi tersebut membentuk satuan kerja teritorial di tingkat desa, yakni Bintara Pembina Desa (Babinsa). Babinsa adalah satuan kerja teritorial terbawah TNI-AD yang berada di bawah Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Dalam menjalankan tugasnya, Babinsa juga mengemban fungsi komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi dan sosialisasi adalah salah satu metode pembinaan teritorial oleh satuan TNI-AD dengan tugas perencanaan dan aktivitas relasi sosial dengan segenap komponen bangsa guna mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bentuk sikap saling pengertian dan kebersamaan sehingga memberi peluang masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah (Hidayat, Susilo, Anggoro; 2023)

Terkait upaya kolaborasi tiga pilar tersebut, *Harian Disway* bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, dan Pemprov Jatim mengadakan perhelatan Anugerah Patriot Jawi Wetan (APJW). Perhelatan tersebut untuk kali pertama diadakan pada 2023. Ajang itu bertujuan memilih tiga pilar terbaik di Jawa Timur melalui seleksi bertahap (<https://harian.disway.id/read/726403/anugerah-patriot-jawi-wetan-2023-mencari-pengabdian-tiga-pilar-terbaik>).

Sebanyak 114 tim dari 38 kabupaten/kota akan dinilai oleh juri yang terdiri atas akademisi serta perwakilan *Harian Disway*. Seleksi ini bertujuan menyaring hingga 10 tim terbaik untuk tahap akhir.

*Harian Disway* adalah media di Surabaya yang didirikan oleh Dahlan Iskan, mantan menteri BUMN sekaligus jurnalis senior, pada 4 Juli 2000. Selain fokus pada berita-berita nasional dan daerah, *Harian Disway* juga dikenal karena berbagai event kolaboratifnya dengan berbagai instansi. Karena itu, Polda Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, dan Pemprov Jawa Timur kembali menggandeng harian tersebut untuk mengadakan Anugerah Patriot Jawi Wetan II pada 2024.

Audiensi untuk penyelenggaraan Anugerah Patriot Jawi Wetan II diadakan pada 14 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jatim menyampaikan dukungannya mengingat dampak positif APJW terhadap pembangunan desa (<https://harian.disway.id/read/811664/pemprov-jatim-siap-dukung-anugerah-patriot-jawi-wetan-ii-2024>).

Di dalam berita itu juga disebutkan bahwa program APJW II tidak hanya bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong inovasi dalam pembangunan desa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan aparat keamanan, diharapkan tiga pilar desa dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya. Penilaian APJW tahun itu juga melibatkan unsur akademisi serta berbagai instansi terkait untuk memastikan proses seleksi yang objektif dan komprehensif.

Menurut Noor Arief Prasyo, redaktur Harian Disway yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana APJW II, keterlibatan akademisi dalam program tersebut diharapkan membawa perspektif lain dalam penilaian, sehingga tolok ukur numerik dari tiga pilar tingkat provinsi bisa ditambah dengan wawasan praktis dan teoretis dari kalangan kampus.

”Diharapkan muncul saran-saran dari akademisi untuk meningkatkan performa desa. Sehingga, proses penjurian tidak hanya untuk menilai tetapi juga diarahkan pada pendampingan desa dalam peningkatan kinerja mereka.” (wawancara dengan Noor Arief Prasyo, 6 Januari 2025)

Di dalam era modern saat ini, tantangan besar yang dihadapi desa-desa adalah keterbatasan dalam memanfaatkan media massa dan media digital untuk mengomunikasikan capaian mereka. Banyak desa tidak memiliki strategi komunikasi publik yang terstruktur, sehingga informasi mengenai keberhasilan mereka sulit diketahui oleh masyarakat luas. Padahal, dalam era informasi saat ini, media massa berperan penting dalam membentuk persepsi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat (McQuail, 2012). Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendampingan kepada tiga pilar desa agar mampu memanfaatkan media sebagai alat strategis komunikasi publik.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

### **Bentuk Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan**

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penjurian yang digabungkan dengan penilaian kinerja desa-desa yang menjadi peserta Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024. Pelaksanaan lomba tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pesertanya adalah 8.496 desa/kelurahan yang ada di seluruh penjurur Jawa Timur. Sebanyak 38 kabupaten/kota tersebut lantas melakukan penyaringan secara lokal. Pelaksananya adalah polres setempat yang bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), serta pemerintah kabupaten/kota.

Setelah itu, masing-masing kabupaten/kota memilih tiga desa untuk diikutsertakan pada tahap kedua. Pada tahap ini, terpilih 114 desa/kelurahan. Mereka akan menjalani serangkaian workshop dan penjurian *online* melalui telekonferensi Zoom.

Workshop tersebut dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 secara daring melalui Zoom dari Ruang Serbaguna Polda Jatim (<https://harian.disway.id/read/810944/anugerah-patriot-jawi-wetan-ii-2024-hari-ini-workshop-114-desa-terpilih>). Dalam pelatihan itu, desa-desa tersebut mendapatkan materi tentang pengelolaan media sosial dan kode etik secara umum. Pematerinya adalah Kasubbid Multimedia Bidhumas Polda Jatim AKBP Nurul Anaturuh, Kasi Media Online Pendam V/Brawijaya Mayor Bambang Sutejo, Kaur Opini Media Cetak Pendam V/Brawijaya Kapten Azis Suwanto, Kepala Dinas Infokom Provinsi Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan redaktur Harian Disway Retna Christa.

Pembekalan dalam *workshop* itu berfokus pada indikator penilaian yang telah diperbarui dan ditambahkan dalam APJW II 2024. Indikator itu belum

digunakan pada APJW I 2023 tahun lalu. Setelah *workshop*, peserta akan dinilai berdasar empat indikator utama. Yakni, publikasi melalui konten media sosial, pemberitaan di media massa, *feedback* atau respons dari masyarakat, serta inovasi dalam produksi publikasi. Karena itu, seluruh materi dalam *workshop* ini dirancang untuk mendukung pemenuhan indikator tersebut.

Desa-desa peserta APJW II kemudian diberi kesempatan mengaplikasikan materi dalam *workshop* tersebut selama satu bulan. Setelah itu, mereka menjalani sesi penjurian *online* yang digelar pada 17-20 September 2024 (<https://harian.disway.id/read/823072/anugerah-patriot-jawi-wetan-ii-2024-cari-20-desakelurahan-terbaik-tim-juri-berdiskusi>). Para juri yang dilibatkan dalam sesi dibagi menjadi dua grup. Pembagian tugas tim juri itu adalah.

1. Tim I menyeleksi 19 kabupaten/kota wilayah barat. Anggotanya adalah:
  - a. Drs. Jupriono, M.Si (FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
  - b. Dr. Gitadi Tegas Supramudyo, Drs, M.Si (FISIP Universitas Airlangga)
  - c. Taufiqurrahman (jurnalis *Harian Disway*)
2. Tim II menyeleksi 19 kabupaten/kota wilayah timur. Anggotanya adalah:

Berikut pembagian tugas tim juri:

  - a. Doan Widhiandono, S.Sos., M.I.Kom (FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
  - b. Probo Darono Yakti, M. Hub. Int (FISIP Universitas Airlangga)
  - c. Guruh Dimas Nugraha (jurnalis *Harian Disway*).

Di dalam sesi penjurian tersebut, tim juri tidak hanya menilai kinerja tiga pilar di masing-masing desa. Juri juga memberikan masukan untuk tiga pilar desa. Masukan itu akan menjadi hal baru yang bisa dilaksanakan oleh desa ketika mereka menjalani penjurian lapangan oleh para juri.



**Gambar 1**

Penilaian dan konsultasi online dengan desa peserta Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024.



**Gambar 2**

Pemberitaan tentang penjurian online Anugerah Patriot Jawi Wetan (APJW) II 2004 di Harian Disway.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Anugerah Patriot Jawi Wetan II (APJW II) 2024, proses penjurian lapangan dilaksanakan untuk menilai secara langsung efektivitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam program-program unggulan yang digagas oleh tiga pilar desa, yakni kepala desa/lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Penjurian lapangan ini menjadi metode strategis dalam mendukung program pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi dan inovasi desa, khususnya dalam hal komunikasi publik, keamanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Kegiatan penjurian lapangan dilaksanakan pada tanggal 30 September hingga 5 Oktober 2024, dengan melibatkan enam orang juri yang terdiri dari akademisi dari FISIP Universitas Airlangga dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta jurnalis dari *Harian Disway*. Untuk mengoptimalkan waktu dan jangkauan wilayah, para juri dibagi menjadi dua tim: Tim Barat dan Tim Timur. Tim Barat bertugas menjuri desa-desa yang berada di wilayah Mataraman dan sekitarnya, sedangkan Tim Timur menjangkau wilayah Tapal Kuda dan Madura. Pembagian itu juga mempertimbangkan efisiensi logistik serta pemerataan kualitas penilaian.

Dalam setiap kunjungan, para juri tidak hanya melakukan observasi terhadap program yang telah dipaparkan pada tahap seleksi daring, tetapi juga berdialog langsung dengan kepala desa/lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Dialog itu menjadi ruang reflektif sekaligus verifikasi terhadap klaim inovasi dan capaian kolaboratif yang diusung oleh tiga pilar. Selain itu, tim juri juga melakukan tinjauan terhadap dokumentasi program, dampak langsung terhadap

masyarakat, serta antusiasme warga dalam mendukung program unggulan yang dijalankan oleh tim tiga pilar desa/kelurahan.

Penilaian lapangan dilakukan terhadap 20 desa/kelurahan terbaik yang telah lolos seleksi dari 114 peserta pada tahap sebelumnya. Desa/kelurahan tersebut adalah:

- Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan
- Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
- Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek
- Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung
- Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar
- Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro
- Desa Sombo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan
- Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang
- Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri
- Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk
- Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang
- Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang
- Desa Manding Daya, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep
- Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
- Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
- Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi
- Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
- Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso
- Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo
- Desa Sumberejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan



**Gambar 3**

Dokumentasi penjurian lapangan Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024



**Gambar 4**

Dokumentasi penjurian lapangan Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024

Kegiatan penjurian lapangan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang penilaian kompetitif, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari metode pengabdian masyarakat yang transformatif, partisipatif, dan berbasis umpan balik langsung dari lapangan. Melalui interaksi tatap muka antara juri dan pelaku di tingkat desa, diperoleh pemahaman kontekstual yang lebih dalam mengenai praktik kolaborasi tiga pilar dalam menghadirkan solusi atas persoalan lokal. Selain itu, penjurian ini turut membuka ruang untuk memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan, pengembangan inovasi, dan perbaikan strategi komunikasi publik secara berkelanjutan.

### **C. CAPAIAN PROGRAM**

Hasil akhir Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024 menjadi cerminan konkret dari efektivitas komunikasi publik tiga pilar desa yang telah dikembangkan dan dinilai secara komprehensif. Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dinobatkan sebagai Juara Umum Pertama, tidak hanya karena kelengkapan fasilitas dan dokumentasi ruang tiga pilar yang dimiliki, tetapi juga karena pendekatannya yang partisipatif, berbasis data, serta menyentuh langsung kebutuhan dan aspirasi warganya. Praktik ini membuktikan bahwa kolaborasi antarpilar dan literasi digital yang mumpuni dapat memperkuat iklim komunikasi yang dialogis dan solutif.

Juara kedua diraih oleh Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, yang menonjol melalui program pemberdayaan sosial, seperti pelatihan UMKM bagi para janda dan penghapusan praktik prostitusi melalui edukasi berbasis komunitas. Sementara itu, Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso menjadi juara ketiga berkat inovasi mereka dalam menghidupkan kembali lahan kritis melalui sumur bor dan irigasi, yang dikomunikasikan secara inklusif kepada warga.

Selain itu, beberapa desa dan kelurahan juga meraih penghargaan dalam kategori tertentu:

- Kategori Harkamtibmas: Desa Sombo, Kabupaten Magetan
- Kategori Pembinaan Teritorial: Desa Wonocoyo, Kabupaten Trenggalek
- Kategori Pembangunan dan Pelayanan Publik: Desa Sepanjang, Kabupaten Banyuwangi

- Kategori Sinergi Antar Lembaga: Kelurahan Pakunden, Kota Blitar
- Kategori Partisipasi Masyarakat: Desa Hadiwarno, Kabupaten Pacitan
- Kategori Komunikasi Publik: Desa Mojotrisno, Kabupaten Jombang
- Kategori Implementasi Program Nasional/Provinsi: Desa Klatakan, Kabupaten Situbondo

Capaian ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi publik yang baik akan memperkuat kehadiran negara di tingkat paling bawah—yakni desa dan kelurahan—melalui keterlibatan aktif warga, dialog antar-aktor, dan inovasi yang relevan. Ajang seperti APJW bukan sekadar lomba administratif, melainkan wahana untuk memetakan dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwa komunikasi publik adalah denyut nadi dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Memberikan pelatihan kepada tiga pilar desa dalam strategi komunikasi publik.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Temuan Lapangan dalam Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024**

Ajang Anugerah Patriot Jawi Wetan 2024 memperlihatkan adanya keberagaman kapasitas komunikasi publik di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan itu merupakan cerminan dari upaya sistematis untuk mendorong sinergi antara kepala desa atau lurah, bhabinkamtibmas, dan babinsa dalam menyampaikan informasi serta menjalin dialog dengan masyarakat. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa berada dalam kondisi yang sama dalam hal kemampuan membangun komunikasi publik yang efektif. Beberapa desa dan kelurahan tampil mencolok dengan strategi komunikasi publik yang terencana, terintegrasi, dan responsif, sementara yang lain masih tampak mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat satu arah dan belum menyentuh esensi partisipasi warga.

Temuan ini sejalan dengan kajian tentang variasi kapasitas komunikasi di tingkat lokal, yang sangat bergantung pada akses informasi dan peran *opinion leader* sebagai penggerak komunikasi partisipatif (Suri, 2019). Desa-desa yang memiliki pemimpin komunikatif dan mampu membaca kebutuhan informasi warganya cenderung lebih aktif dalam memanfaatkan media sosial, menyusun pesan yang kontekstual, serta melibatkan warga dalam pertemuan dan diskusi terbuka.

Salah satu praktik baik yang menonjol ditemukan pada Kelurahan Gadang, Kota Malang. Kelurahan ini menunjukkan kemampuan dalam membangun sistem komunikasi publik yang kohesif, melibatkan unsur warga, serta memadukan berbagai kanal komunikasi secara strategis. Kanal-kanal ini mencakup media sosial, media luar ruang, hingga forum tatap muka yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Strategi berbasis kanal ganda seperti ini mampu memperluas jangkauan pesan dan memperkuat kedekatan emosional dengan audiens (Suri, 2019).

Kelurahan Gadang bahkan aktif menyelenggarakan sesi tanya jawab daring, menggunakan infografis untuk menyampaikan data program pembangunan, dan membuat video pendek yang menampilkan narasi warga. Kehadiran ruang tiga pilar yang fungsional, struktur Omah Rembug (program Polda Jatim untuk

komunikasi tiga pilar di tingkat desa) yang lengkap, serta dokumentasi pertemuan yang tertata menjadi bukti nyata dari sistem komunikasi yang berjalan.

Sebaliknya, beberapa desa lain menunjukkan keterbatasan dalam hal teknologi, sumber daya manusia, dan kesadaran akan pentingnya komunikasi publik. Media sosial di beberapa desa dikelola secara pasif, hanya memuat dokumentasi kegiatan seremonial tanpa ada interaksi atau pesan bermakna. Media luar ruang pun diperlakukan sebagai alat seremonial, bukan instrumen komunikasi strategis. Fenomena itu mencerminkan tantangan literasi digital dan budaya komunikasi satu arah yang masih dominan (Livingstone, 2004).

Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakseimbangan peran tiga pilar desa. Kepala desa atau lurah sering kali menjadi figur dominan, sementara peran bhabinkamtibmas dan babinsa dalam strategi komunikasi publik masih terbatas. Ketimpangan tersebut relevan dengan studi-studi tentang koordinasi kelembagaan di tingkat desa, yang menekankan pentingnya kolaborasi horizontal dan keterlibatan aktif semua unsur dalam penyusunan dan penyampaian pesan publik (Ramadhani & Prihantoro, 2020).

#### **Pendekatan Konsultasi dan Arahan Perbaikan**

Para juri dalam ajang ini tidak hanya memberi penilaian, tetapi juga menjalankan fungsi konsultatif yang penting. Mereka melakukan pendampingan langsung kepada desa dan kelurahan yang belum optimal dalam mengelola komunikasi publik, dengan memberi masukan berbasis bukti dan pengalaman praktik terbaik. Kegiatan itu sejalan dengan pendekatan *coaching-based development* dalam komunikasi pembangunan, yang menekankan transformasi kapasitas lokal secara kolaboratif dan reflektif (Kent & Taylor, 2002).

Dalam hal ini, yang diarahkan para juri dalam proses penilaian dan pendampingan di desa adalah sebagai berikut:

- Strategi Optimalisasi Media Sosial  
Media sosial menjadi saluran yang sangat potensial untuk menjangkau warga, terutama generasi muda. Namun, tantangannya bukan hanya pada penguasaan teknologi, melainkan juga pada aspek perencanaan konten, pemilihan gaya visual, dan konsistensi penyampaian. Juri mendorong desa-desa untuk menyusun kalender konten bulanan, merancang infografis yang mudah dipahami, serta memproduksi video pendek yang relevan dengan isu lokal. Literasi media yang mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten menjadi elemen penting dalam konteks ini (Livingstone, 2004).  
Selain itu, penting untuk membangun interaksi dua arah dengan warga. Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang tanggapan, polling, dan diskusi daring. Langkah ini bertujuan menggeser paradigma komunikasi dari monolog ke dialog.
- Penyempurnaan Media Luar Ruang  
Media luar ruang seperti baliho, spanduk, dan poster tetap penting, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses digital. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas visual dan strategisnya penempatan. Juri menyarankan agar satu media hanya memuat satu pesan utama, dengan desain visual yang kuat, kontras warna yang jelas, dan teks yang dapat dibaca dalam

sekali lihat. Prinsip desain komunikasi visual seperti keterbacaan, fokus, dan kontras visual menjadi dasar dalam pendekatan ini (Landa, 2016).

Pelatihan desain grafis sederhana bagi kader desa atau kerja sama dengan komunitas kreatif lokal juga disarankan sebagai strategi jangka panjang.

○ Pendekatan Komunikasi Holistik

Kekuatan komunikasi publik terletak pada integrasi saluran komunikasi. Juri mendorong desa-desa untuk tidak hanya bergantung pada satu kanal, tetapi memadukan media sosial, media luar ruang, komunikasi interpersonal, serta media tradisional seperti pengeras suara masjid atau radio komunitas. Model komunikasi multi-kanal telah terbukti efektif dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan latar belakang literasi yang berbeda (Kent & Taylor, 2002; Saputra et al., 2020).

Pengalaman Desa Sindangsari (Saputra et al., 2020) yang membentuk RAMSI (Radio Antar Masyarakat Sindangsari) menunjukkan bahwa media alternatif berbasis komunitas dapat menjadi solusi ketika sinyal internet lemah atau tidak stabil. Komunikasi publik yang baik adalah komunikasi yang adaptif terhadap konteks lokal.

Evaluasi berkala juga menjadi bagian penting dalam siklus komunikasi. Survei kepuasan warga, forum rembug terbuka, hingga diskusi kelompok terfokus menjadi sarana untuk mendengar umpan balik dan menyesuaikan strategi komunikasi yang dilakukan.

**Implikasi Temuan**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi publik sangat ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, serta orientasi budaya organisasi desa. Di banyak tempat, inovasi komunikasi terhambat oleh minimnya pelatihan, keterbatasan anggaran, serta belum terbentuknya budaya komunikasi yang reflektif dan terbuka. Temuan itu senada dengan tantangan komunikasi pembangunan di era digital yang mencerminkan kesenjangan antara teknologi dan kesiapan budaya serta strategi lokal (Liu, 2012).

Namun demikian, tiga pilar desa memiliki potensi besar sebagai motor penggerak komunikasi publik. Dengan pelatihan berkelanjutan dalam literasi media, keterampilan komunikasi interpersonal, dan manajemen informasi, mereka dapat menjadi simpul penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. *Capacity building* bagi aktor lokal menjadi kata kunci dalam proses tersebut (Ramadhani & Prihantoro, 2020).

Peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis. Bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga fasilitator pelatihan, penyedia infrastruktur, dan penggerak sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah dapat menjadi katalisator inovasi komunikasi publik di tingkat desa, sekaligus penjamin keberlanjutan program yang telah dirintis.

Akhirnya, praktik-praktik unggulan seperti yang dilakukan Kelurahan Gadang perlu didokumentasikan, disebarluaskan, dan dijadikan rujukan inspiratif bagi desa-desa lain. Studi tentang diseminasi praktik baik menunjukkan bahwa narasi lokal yang berhasil dapat mendorong replikasi inovasi dan mempercepat proses transformasi komunikasi publik desa (Saputra et al., 2020).

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Ajang Anugerah Patriot Jawi Wetan 2024 telah menjadi wahana penting untuk memotret dan merefleksikan kondisi komunikasi publik tiga pilar desa di Jawa Timur. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam kemampuan desa/kelurahan membangun sistem komunikasi publik yang partisipatif, dialogis, dan terstruktur. Kelurahan Gadang, misalnya, tampil sebagai contoh terbaik bagaimana sinergi antar tiga pilar dapat menghasilkan inovasi komunikasi yang strategis, berbasis kanal ganda, dan berbasis data.

Kondisi itu memperkuat pandangan bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan sangat tergantung pada kualitas hubungan antara pemimpin lokal dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Saputra, Sukarelawati, dan Agustini (2020), “pembangunan di suatu pedesaan dapat tercapai jika komunikasi antara opinion leader atau pemimpin pendapat dengan masyarakat berjalan dengan baik” (hal. 42). Pendekatan *top-down* perlu dilengkapi bahkan digeser menuju komunikasi dua arah yang terbuka terhadap aspirasi dan partisipasi warga.

Literasi media menjadi syarat utama agar tiga pilar desa tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga komunikator publik yang kredibel. Livingstone (2004) menyatakan bahwa “*media literacy is the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety of contexts*” (hal. 5), yang artinya, komunikasi publik tidak bisa dilepaskan dari kemampuan teknis dan kritis terhadap media yang digunakan.

Namun, transformasi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kelembagaan dan fasilitasi dari pemerintah daerah. Liu (2012) menggarisbawahi bahwa “*the lack of vision, coherent strategy and a sustainable model are the issues that need to be addressed*” (hlm. 94), yang juga terlihat pada beberapa desa yang belum memiliki arah komunikasi yang jelas, baik dari segi pesan, media, maupun evaluasi.

Dalam konteks *public relations*, pendekatan dialogis menjadi sangat relevan. Kent dan Taylor (2002) menegaskan bahwa “*dialogue is not a process or a series of steps. Rather, it is a product of ongoing communication and relationships*” (hal. 22). Maka komunikasi publik desa yang ideal adalah yang tumbuh dari relasi sosial yang sehat dan berbasis saling percaya antarwarga dan aparatur.

### Saran

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disampaikan beberapa saran berikut:

- a. Untuk Program Pengabdian Masyarakat
  - Fokus pada Pelatihan Literasi Media Digital  
Program pengabdian sebaiknya mengedepankan pelatihan berbasis praktik dalam membuat konten visual, mengelola media sosial desa, serta menyusun narasi kampanye publik berbasis lokal.
  - Pendampingan Penyusunan Strategi Komunikasi Terpadu Desa  
Dibutuhkan fasilitasi penyusunan strategi komunikasi publik yang memadukan media digital, media tradisional, serta forum tatap muka warga dengan sistem evaluasi berkala.

- Penguatan Peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam Komunikasi Publik  
Program pelatihan atau pendampingan harus mencakup ketiga pilar secara seimbang agar sinergi dalam menyusun dan menyampaikan pesan dapat berjalan harmonis.
- b. Untuk Penelitian Selanjutnya
  - Kajian Tipologi Komunikasi Publik Tiga Pilar di Berbagai Wilayah  
Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang membandingkan pendekatan komunikasi publik di desa/kelurahan berbasis wilayah geografis, sosial budaya, atau tingkat urbanisasi.
  - Studi Longitudinal atas Efektivitas Media Sosial Desa  
Penelitian dapat difokuskan pada bagaimana akun media sosial desa membangun keterlibatan warga secara jangka panjang dan apa dampaknya terhadap layanan publik dan transparansi.
  - Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Komunikasi Publik Desa  
Penelitian ini penting untuk melihat seberapa besar kebijakan dan anggaran pemerintah daerah memfasilitasi inovasi komunikasi publik di tingkat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.685>
- Harian Disway. (2024, Desember 20). *Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023: Mencari pengabdian tiga pilar terbaik*. <https://harian.disway.id/read/726403/anugerah-patriot-jawi-wetan-2023-mencari-pengabdian-tiga-pilar-terbaik>
- Harian Disway. (2024, Desember 20). *Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024: Hari ini workshop 114 desa terpilih*. <https://harian.disway.id/read/810944/anugerah-patriot-jawi-wetan-ii-2024-hari-ini-workshop-114-desa-terpilih>
- Harian Disway. (2024, Desember 20). *Pemprov Jatim siap dukung Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024*. <https://harian.disway.id/read/811664/pemprov-jatim-siap-dukung-anugerah-patriot-jawi-wetan-ii-2024>
- Harian Disway. (2024, Desember 20). *Anugerah Patriot Jawi Wetan II 2024 cari 20 desa/kelurahan terbaik: Tim juri berdiskusi*. <https://harian.disway.id/read/823072/anugerah-patriot-jawi-wetan-ii-2024-cari-20-desakelurahan-terbaik-tim-juri-berdiskusi>
- Hidayat, E., Susilo, D., & Anggoro, T. (2023). Strategi komunikasi tentara dalam upaya membantu pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(1), 121–133. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i1.6056>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024, Desember 20). *Visi dan misi*. <https://kemendesa.go.id/berita/view/kemendesa/2956/visi-dan-misi>

- Kent, M. L., & Taylor, M. (2002). Toward a dialogic theory of public relations. *Public Relations Review*, 28(1), 21–37. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(02\)00108-X](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(02)00108-X)
- Landa, R. (2016). *Graphic design solutions* (6th ed.). Cengage Learning.
- Liu, C. (2012). Informatization and digital divide: A comparative analysis of e-government performance in developing and developed countries. *Government Information Quarterly*, 29(1), 85–97. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.08.001>
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- McQuail, D. (2012). *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E. (2020). Strategi komunikasi pembangunan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 119–126. <https://doi.org/10.46937/18202029834>
- Saputra, A., Sukarelawati, S., & Agustini, I. (2020). Komunikasi pembangunan Desa Sindangsari dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. *UNIDA Journal of Islamic Media and Communication*, 6(1), 39–44. <https://doi.org/10.30983/comm.v6i1.26848>
- Suri, D. (2019). Peran media sosial dalam komunikasi pembangunan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 175–182. <https://doi.org/10.46937/17201928269>